

**PERBANDINGAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK
DI VIETNAM DAN INDONESIA
(STUDI KASUS PROSEDUR DALAM MEMULAI BISNIS)**

Irfan Winaldi

**Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
Bandung, Jawa Barat, Indonesia**

winaldiirfan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai perbandingan reformasi birokrasi pelayanan publik negara berkembang, yaitu Vietnam dan Indonesia. Penelitian ini mengambil data dari *world bank* dalam *easy of doing business* dengan mengukur salah aspek penilaian yaitu *starting a business*. Di dalam *starting a business* terdapat kategori dalam penilainnya, yaitu: jumlah prosedur yang dibutuhkan; berapa hari yang dibutuhkan; dan berapa biaya yang digunakan dalam memulai suatu bisnis. Dalam ranking yang dikeluarkan *world bank* di *website Easy of Doing Business* yang dihitung berdasarkan secara global Vietnam berada di ranking 70 sedangkan Indonesia sendiri berada di bawahnya yaitu ranking 73. Dari salah satu aspek *easy of doing business* yaitu *starting a business*. Peringkat Vietnam yang dihitung berdasarkan kawasan asia tenggara dan pasifik berada di atas Indonesia yaitu ranking 14 dari 25 negara, sedangkan Indonesia sendiri ranking 18 dari 25 negara. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi komparatif. Oleh karena itu penulis ingin melihat perbedaan antara Vietnam dan Indonesia dari segi reformasi birokrasi pelayanan public.

Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, Bisnis.

ABSTRACT

This research is about the comparison of the reform of the public service bureaucracy in developing countries, namely Vietnam and Indonesia. This study takes data from the world bank in easy of doing business by measuring one aspect of the assessment, namely starting a business. In starting a business, there are categories in its assessment, namely: the number of procedures required; how many days it will take; and how much it costs to start a business. In the ranking issued by the world bank on the Easy of Doing Business website, which is calculated based on the global ranking, Vietnam is ranked 70, while Indonesia itself is ranked 73. From one aspect of easy of doing business, namely starting a business. Vietnam's ranking, which is calculated based on the Southeast Asia and Pacific region, is above Indonesia, which is ranked 14th out of 25 countries, while Indonesia ranks 18th out of 25 countries. This research uses qualitative research methods with a comparative study. Therefore, the author wants to see the difference between Vietnam and Indonesia in terms of public service bureaucratic reform.

Keywords: Bureaucratic Reform, Public Service, Business.

PENDAHULUAN

Good Governance tumbuh menjadi paradigma baru yang diharapkan menjadi konsep yang mampu mengobati birokrasi yang saat ini dinilai sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. (Ndue, 2005) menjelaskan dalam (Haning, 2018) bahwa dalam penyelenggaraan publik dibutuhkan sebuah birokrasi yang berkompeten untuk melaksanakan sebuah kebijakan, semua hal tersebut bermuara keapa konsep *good governance*. (Maryam, 2016) menjelaskan pelayanan publik merupakan roda penggerak utama dari *good governance*. Tolak ukur dari keberhasilan kinerja pemerintah melalui birokrasi salah satunya adalah melalui pelayanan publik. Kurniawan (2005:4) menjelaskan dalam

(Cahyadi, 2016) pelayanan publik sendiri merupakan layanan yang diberikan untuk memenuhi keperluan kepentingan masyarakat yang disesuaikan dengan prosedur atau aturan yang telah ditetapkan Vietnam menjadi negara berkembang dengan ekonomi yang cukup besar dengan GDPnya sendiri didorong dari sektor investasi dan industri yang terus meningkat. PDB Vietnam tumbuh 6.7% pada tahun 2019. Selain Vietnam, salah satu negara berkembang adalah Indonesia. Akan tetapi, PDB Indonesia pun diprediksi hanya akan tumbuh 5% di 2019. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 masih kalah dibanding Vietnam. Negara Vietnam sendiri tumbuh sekitar 6,7%. Untuk mengembangkan ekonomi sebuah negara, salah satu yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan reformasi birokrasi khususnya di pelayanan publik yang dilakukan di sektor ekonomi atau bisnis. *Easy of doing business* adalah suatu tolak ukur yang dibuat oleh *world bank* yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk meninjau alur birokrasi kemudahan dalam berbisnis. World Bank (2018:12) menjelaskan ada beberapa kategori dalam penilaian *easy doing of business*, salah satunya kategori penilaiannya yaitu *starting a business*. World Bank mengatakan bahwa *starting a business* merupakan indeks untuk bagaimana negara melayani masyarakat dalam segi membuka perusahaan/bisnis.

Dalam ranking yang dikeluarkan *world bank* di website *Easy of Doing Business* yang dihitung berdasarkan secara global Vietnam berada di ranking 70 sedangkan Indonesia sendiri berada di bawahnya yaitu ranking 73. Dari salah satu aspek *easy of doing business* yaitu *starting a business*. Peringkat Vietnam yang dihitung berdasarkan kawasan asia tenggara dan pasifik berada di atas Indonesia yaitu ranking 14 dari 25 negara, sedangkan Indonesia sendiri ranking 18 dari 25 negara. Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melihat perbandingan reformasi birokrasi yang dilakukan dalam pelayanan publik khususnya dalam aspek *starting a business* yang merupakan langkah awal masyarakat dalam memulai bisnis di negara Vietnam dengan membandingkannya dengan negara Indonesia.

METODE

Penulis menggunakan metode dalam artikel ini adalah dengan metode penelitian kualitatif dengan studi komparatif. Menurut Arikunto (2019) kualitatif merupakan metode bertujuan untuk mengumpulkan data maupun informasi mengenai status suatu fenomena yang ada. Metode kualitatif mampu mengungkap fenomena yang terjadi pada objek yang ingin diteliti. Adapun pendekatan studi komparatif. Menurut Sukmadinata (2012:79) studi perbandingan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan dua atau lebih kejadian, kondisi, program, data atau yang lainnya. Hudson (2007:3) menjelaskan bahwa studi komparatif dilakukan dengan cara membandingkan dua atau lebih data yang diteliti baik dengan membandingkan perbedaan maupun persamaan atas pemikiran tertentu. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan studi pustaka, yaitu dengan mencari data sekunder, dengan mempelajari berbagai literatur diantaranya buku artikel, maupun yang lainnya. Penggalan data dalam artikel ini sebagian besar melalui situs website milik *world bank* yaitu <https://www.doingbusiness.org> khususnya bagian negara vietnam dan negara indonesia, sedangkan sebagian yang dengan mempelajari buku dan jurnal terkait.

PEMBAHASAN

Easy of Doing Business (EODB) merupakan suatu ranking dari negara-negara yang dibuat oleh *World Bank* untuk mengukur indeks kemudahan dalam berbisnis. Semakin tinggi ranking *ease of doing business* suatu negara berarti pemerintahan negara tersebut semakin kondusif dalam menyelenggarakan bisnis. Ada 10 indikator yang *World Bank* gunakan untuk mengukur kemudahan berbisnis di sebuah negara:

1. *Starting a business*
2. *Dealing with construction permit*
3. *Getting electricity*
4. *Registering property*
5. *Getting credit*
6. *Protecting minority investors*
7. *Paying taxes*
8. *Trading across border*
9. *Enforcing contracts*
10. *Resolving insolvency*

Dalam artikel ini penulis fokus pada salah satu aspek penilaian yaitu *starting a business*. *Starting a business* merupakan indikator yang mengukur bagaimana tahapan-tahapan dari warga negara untuk memulai sebuah bisnis. *Starting a business* mengukur dari segi tahapan-tahapan yang dilakukan, Waktu, biaya yang dibutuhkan untuk mendirikan Perseroan Terbatas. *Starting a business* diukur dari beberapa indikator tersendiri, yaitu:

1. Jumlah prosedur atau tahapan untuk meresmikan sebuah perusahaan, dengan rincian yang dihitung dengan jumlah tahapannya. Adapun rinciannya sebagai berikut:
 - a. Pra-registrasi (contoh: pendaftaran nama atau reservasi di notaris)
 - b. Melakukan registrasi di kota-kota yang mempunyai ekonomi bisnis yang besar
 - c. Post-registration (contoh: pendaftaran jaminan sosial)
 - d. Memperoleh persetujuan dari pasangan untuk memulai bisnis
 - e. Memperoleh dokumen resmi
2. Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan setiap prosedur dihitung berdasarkan jumlah hari yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap prosedur tersebut
 - a. Setiap prosedur harus mempunyai hari yang terpisah. Dua prosedur tidak bisa dimulai dihari yang sama
 - b. Prosedur online dicatat setengah hari
 - c. Prosedur dianggap selesai jika dokumen akhir yang dibuat dapat diterima
 - d. Tidak melakukan kontak dengan pejabat yang berwenang untuk mempercepat waktu prosedur
3. Biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan prosedur
 - a. Dihitung dari biaya resmi, bukan dari biaya suap
 - b. Ada atau tidaknya biaya profesional kecuali biaya layanan yang diwajibkan oleh hukum

World bank menjelaskan dalam website *Easy of Doing Business* setiap negara mempunyai tahapan-tahapan dalam memulai sebuah bisnis dari membuat nama perusahaan sampai perusahaan tersebut menjadi resmi legal. Adapun Negara Vietnam mempunyai tahapan-tahapan untuk memulai bisnis atau mendirikan perusahaan, yaitu:

Tabel Prosedur memulai bisnis di Vietnam

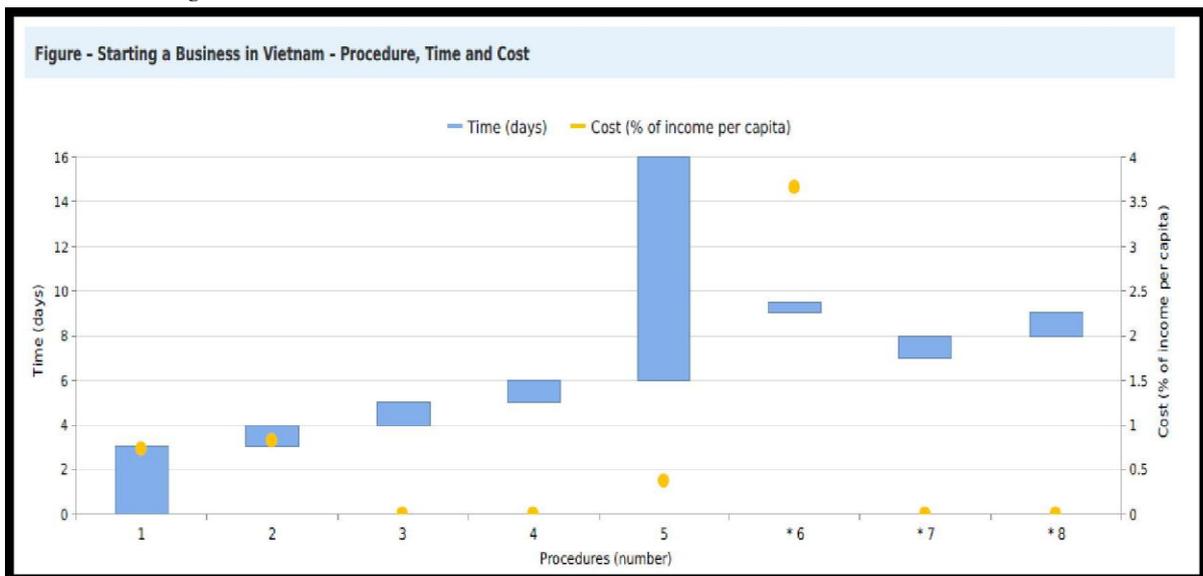
No.	Tahapan	Waktu	Biaya
1	<p>Periksa nama perusahaan yang diusulkan, dapatkan sertifikat bisnis dan pendaftaran pajak dan mempublikasikan konten pendaftaran di National Business Registration Portal (NBRP)</p> <p>a. Untuk mendaftarkan perusahaan, pemohon harus menyerahkan dokumen sesuai dengan yang ada di peraturannya.</p> <p>b. Setelah menerima dokumen tersebut, kantor registrasi bisnis akan menginput kedalam sebuah aplikasi pendaftaran bisnis nasional dan memeriksa dokumen pendukung lainnya</p> <p>c. Kantor Pendaftaran Bisnis akan mengeluarkan sertifikat perusahaan selama 3 hari kerja jika dokumen-dokumennya telah terpenuhi</p> <p>d. Dalam 5 hari kerja setelah dikeluarkannya sertifikat</p> <p>e. Pendaftaran perusahaan registrasi bisnis harus mengirimkan dokumen pendaftaran tersebut ke kantor otoritas pajak, departemen statistik, departemen tenaga kerja dan departemen asuransi sosial.</p> <p>f. Layanan online sebenarnya sudah tersedia, akan tetapi dalam tindak lanjutnya memerlukan dokumen dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan justru memakan waktu lebih lama. Sehingga orang-orang lebih mendaftarkannya langsung melalui</p>	3 Hari	VND 100.000 (Jika pendaftaran online, gratis); VND 300.000 untuk publikasi
2	<p>Membuat segel resmi perusahaan perusahaan</p> <p>Membuat stempel, cap, atau segel resmi perusahaan bertujuan untuk membuka rekening di bank</p>	1 Hari	VND 450.000
3	<p>Mengirimkan pemberitahuan sampel segel resmi perusahaan secara online Pengusaha harus mengirimkan contoh sampel segel resmi perusahaan secara online ke kantor registrasi bisnis</p>	1 Hari	Gratis
4	<p>Membuat rekening perusahaan di bank</p>	1 Hari	Gratis
5	<p>Menyetujui bentuk faktur PPN sebelum dicetak dengan Departemen Perpajakan</p> <p>Perusahaan harus menggunakan faktur PPN yang dicetak sendiri, dibeli atau juga bisa dilakukan secara online Dibutuhkan sekitar 10 hari untuk mendapatkan faktur PPN yang dicetak sendiri dan mendaftarkannya di departemen perpajakan</p>	10 Hari	VND 200.000 per buku
6	<p>Membayar pajak lisensi bisnis Membayar pajak lisensi bisnis harus dibayarkan di kantor otoritas pajak tempat perusahaan mendaftarkan pajaknya. Pajak lisensi ini</p>	Kurang dari sehari (dilakukan	VND 2.000.000 (pajak lisensi bisnis)

No.	Tahapan	Waktu	Biaya
	harus dibayarkan setiap tahun	secara online), bersamaan dengan prosedur sebelumnya	
7	Mendaftarkan karyawan perusahaan ke kantor tenaga kerja Dalam 30 hari sejak perusahaan beroperasi, pengusaha harus mendaftarkan semua karyawan ke kantor tenaga kerja	1 hari, bersamaan dengan prosedur sebelumnya	gratis
8	Mendaftarkan karyawan perusahaan ke dalam asuransi sosial untuk asuransi kesehatan dan sosial karyawan perusahaan tersebut	1 hari, bersamaan dengan prosedur sebelumnya	Gratis

Sumber: *World Bank Doing Business, 2019*

Dari tabel tersebut langkah-langkah dalam *starting a business* di negara Vietnam terdapat 8 prosedur agar perusahaan tersebut resmi atau legal. Waktu penyelesaian kesemua prosedur tersebut adalah 16 hari. Vietnam sendiri telah menyediakan layanan online untuk tahap awal layanan *starting a businessnya*, akan tetapi karena hasil akhirnya harus mencetak dan menyerahkan dokumen langsung maka orang-orang lebih cenderung untuk datang ke kantornya langsung. *World bank* memberikan nilai Vietnam dari aspek *starting a business* adalah sebesar 85.1 (0-100). Untuk lebih jelasnya mengenai waktu yang dibutuhkan dan mekanisme *starting a business* negara Vietnam dijelaskan melalui gambar di bawah ini

Gambar *Starting a Business* di Vietnam



Sumber: *World Bank Doing Business, 2019*

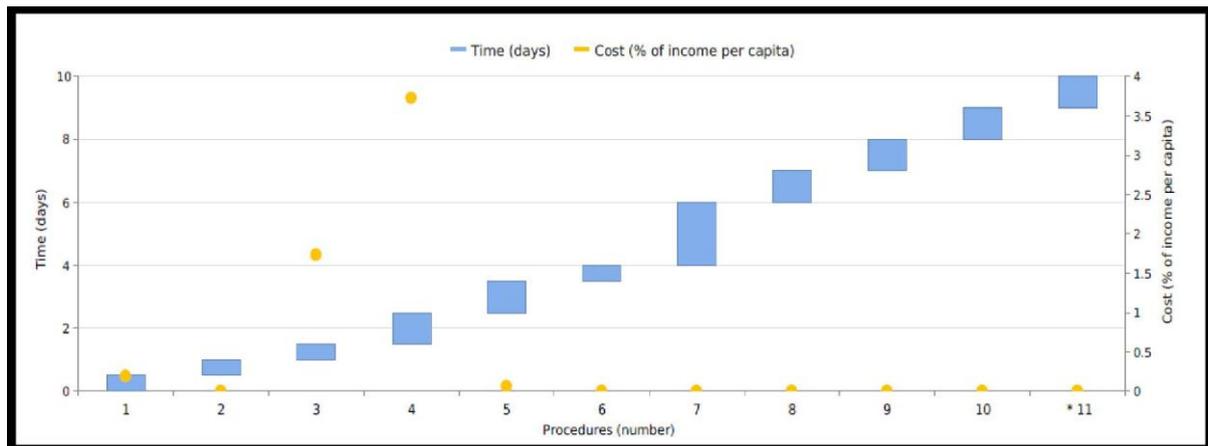
Sedangkan negara Indonesia, menurut *World Bank* tahapan-tahapan dalam memulai sebuah bisnis dari membuat nama perusahaan sampai perusahaan tersebut menjadi resmi adalah sebagai berikut :

No.	Tahapan	Waktu	Biaya
1	Membayar biaya untuk mendapatkan izin nama perusahaan Proses ini dilakukan secara online melalui bantuan notaris untuk mendapatkan nama resmi sebuah perusahaan. Notaris harus membayar biaya Rp 100.000 untuk mendapatkan izin nama perusahaan tersebut	Kurang dari Satu hari (Online)	Rp 100.000
2	Mendapatkan izin nama perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM Untuk mendapatkan izin untuk nama perusahaan, notaris memasukkan kode online saat memesan nama perusahaan sebagai bukti pembayaran, dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan	Kurang dari Satu hari (Online)	Termasuk kedalam prosedur ketiga
3	Membayar biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagai biaya validasi dan publikasi perusahaan	Kurang dari Satu hari (Online)	Rp. 500.000 (validasi perusahaan sebagai badan hukum) Rp 430.000 (publikasi)
4	Menyiapkan notaris untuk mebuatkan akta perusahaan. Notaris harus mendapatkan formulir standar untuk akta perusahaan, agar pengusaha melengkapi dan meninjau sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh mereka. Notaris kemudian akan membuatkan dokumen perusahaan (akta pendirian, akta perusahaan).	1 Hari	Tergantung modal perusahaan
5	Membuat cap perusahaan	1 Hari	Rp 30.000
6	Mendisposisikan akta pendirian ke Kementerian Hukum dan HAM Prosedur ini dilakukan secara online dengan melampirkan rekening bank perusahaan. Setelah melalui beberapa tahapan, Kementerian Hukum dan HAM akan mengeluarkan surat persetujuan akta perusahaan secara online	Kurang dari Satu hari (Online)	Termasuk kedalam prosedur keenam
7	Mendaftar untuk mendapatkan surat domisili perusahaan	2 Hari	Gratis
8	Mendaftar untuk mendapatkan nomor bisnis tunggal (NIB) Prosedur ini bertujuan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha	1 Hari	Gratis

No.	Tahapan	Waktu	Biaya
	Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan) yang dilakukan online		
9	Mendaftarkan Tenaga Kerja ke Kementerian Tenaga Kerja	1 Hari	Gratis
10	Mendaftar untuk memperoleh BPJS Ketenagakerjaan	1 Hari	Gratis
11	Mendaftar ke Kantor Pajak untuk memperoleh nomor pendaftaran wajib pajak (NPWP) dan nomor pengumpul PPN	1 Hari (bersamaan dengan prosedur sebelumnya)	Gratis

Sumber: *World Bank Doing Business, 2019*

Starting a business di Indonesia mempunyai 11 prosedur agar perusahaan tersebut resmi atau legal. Penyelesaian waktu yang dibutuhkan agar kesemua prosedur tersebut adalah 13 hari. *World bank* memberikan nilai untuk Indonesia dari aspek *starting a business* adalah sebesar 81.2 (0-100). Untuk lebih jelasnya mengenai waktu yang dibutuhkan dan mekanisme *starting a business* negara Vietnam dijelaskan melalui gambar di bawah ini.



Sumber: *World Bank Doing Business, 2019*

Berikut adalah tabel perbandingan *starting a business* Vietnam dan Indonesia

Indikator <i>Starting a business</i>	Vietnam	Indonesia
Prosedur (Jumlah)	8	11
Waktu (Hari)	16	13
Biaya	5.6	5.7

Sumber: *World Bank Doing Business, 2019*

Dari segi prosedural Vietnam lebih sedikit dari Indonesia, Vietnam mempunyai 8 tahapan, sedangkan Indonesia mempunyai 11 langkah. Akan tetapi dari segi *e-government* Indonesia lebih banyak prosedur yang dilakukan melalui online daripada Vietnam. Waktu yang dibutuhkan Vietnam dalam *starting a business* adalah sebesar 16 hari dan lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia yang 13 hari. Sedangkan dari segi biaya yang dibutuhkan Indonesia lebih banyak daripada Vietnam. Dari sisi pelayanan publik, pengusaha atau masyarakat yang ingin mendaftarkan atau membuat

perusahaan bisnis sendiri langsung dibantu oleh Instansi pemerintah Vietnam yaitu kantor registrasi bisnis. Sedangkan di Indonesia harus melalui notaris terlebih dahulu. Dalam mengurus pendaftaran perusahaan bisnis Vietnam mempunyai lebih sedikit instansi yang dibutuhkan daripada di Indonesia. Vietnam hanya 3 yaitu : Dinas Pendaftaran Bisnis; Kantor Pajak; dan Dinas urusan tenaga kerja. Sedangkan Indonesia membutuhkan banyak instansi ada 5, yaitu : Notaris; Kementerian Hukum dan HAM; Kantor Pajak; Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu; dan Dinas Tenaga Kerja

KESIMPULAN

Vietnam merupakan negara berkembang dengan ekonomi yang cukup besar dengan GDPnya sendiri didorong dari sektor investasi dan industri yang terus meningkat. Menurut World Bank di situs Easy of doing business. Vietnam merupakan negara yang cukup berkembang dalam melakukan reformasi birokrasi pelayanan khususnya pelayanan dalam hal membuka bisnis atau starting a business. Di bandingkan dengan negara asia tenggara lainnya seperti Indonesia Vietnam memiliki keunggulan tersendiri yaitu dari segi biaya dan prosedur. Walaupun sedikit melalui prosedur online, dibandingkan Indonesia Vietnam lebih unggul karena membutuhkan instansi yang lebih sedikit daripada Indonesia. Sehingga dari variabel diatas membuat negara Vietnam memiliki pertumbuhan PDB dan *Rangking Easy of Doing Business* yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadi, A. (2016). PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good) Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(02). <https://doi.org/10.30996/jpap.v2i02.1004>
- Haning, M. T. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. *Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 4(1), 25–37.
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VI(1), 1–18.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Satibi, Iwan. *Manajemen Publik Dalam Perspektif Teoritik dan Empirik*. 2012. Bandung: Unpas Press
- Satibi, Iwan. *Teknik Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: CEPLAS (*Centre For Political and Local Autonomy Studies*).
- Siagian, Sondang P. *Filsafat Administrasi*. 2014. Jakarta : Bumi Aksara
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Priansa, Donni Junni. 2018. *Manajemen Organisasi Publik*. Bandung: Pustaka Setia.

Website:

<https://www.doingbusiness.org> diakses pada tanggal 14 November 2019 pukul 19.30 WIB

<http://eodb.ekon.go.id/> diakses pada tanggal 15 November 2019 pukul 20.30 WIB